

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang secara astronomis terletak pada 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Secara geografis kota ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal di sebelah barat, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan. Luas wilayah kota ini diperkirakan sekitar 373,70 km² atau 37.366,836 hektar, yang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Cina, Arab, dan keturunan lainnya. Banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang menetap di Semarang untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Mata pencaharian penduduk beragam, mulai dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerja pabrik, hingga petani. Meskipun memiliki keberagaman etnis dan agama, kehidupan sosial masyarakat Semarang tetap damai dan toleran. Ini merupakan faktor penting yang mendukung keamanan dan kemajuan investasi serta bisnis di kota ini.

Sebagai kota metropolitan, Semarang memiliki beragam sektor usaha, salah satunya adalah sektor Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Platform Satu Data Indonesia, jumlah UMKM di Kota Semarang terus meningkat dari tahun ke tahun. UMKM tidak hanya menjadi penopang perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Keberadaan UMKM di berbagai wilayah Semarang mulai dari pusat kota hingga pinggiran menunjukkan kontribusinya yang signifikan terhadap penguatan ekonomi, terutama di bidang kuliner, kerajinan tangan, tekstil, dan sektor jasa lainnya. Dukungan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat menjadi pilar penting dalam pertumbuhan UMKM di Semarang.

2.1.1 Kondisi Demografi Kota Semarang

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan wilayah. Letaknya yang berada di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, dan logistik di wilayah tengah Indonesia. Peran strategis ini diperkuat dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, bandara, serta jaringan jalan tol yang menghubungkan Semarang dengan kota-kota besar lainnya. Dengan kondisi tersebut, Kota Semarang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi provinsi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.694.740 jiwa, yang terdiri atas 838.440 laki-laki dan 856.310 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 97,91 menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dengan luas wilayah sebesar 373,78 km², kepadatan penduduk Kota Semarang mencapai sekitar 4.535 jiwa per km². Angka ini mencerminkan tingkat

urbanisasi yang tinggi dan tingginya tekanan terhadap ruang kota, terutama di wilayah pusat dan kawasan pertumbuhan baru.

Gambar 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Mijen	42.908	44.876	4.642	42.910	45.072	46.668
Gunung Pati	49.341	50.310	50.735	49.333	50.442	50.842
Banyumanik	69.717	70.675	70.861	71.602	72.756	72.885
Gajah Mungkur	27.204	27.602	276	28.286	28.748	28.734
Semarang Selatan	29.744	30.215	30.224	31.466	31.964	31.794
Candisari	36.709	37.302	37.317	37.752	38.312	38.125
Tembalang	96.306	98.833	100.313	97.174	100.029	101.508
Pedurungan	95.667	97.167	97.609	97.456	99.359	99.859
Genuk	64.514	66.946	68.709	64.182	65.527	66.847
Gayamsari	34.421	34.996	35.019	34.913	35.411	35.369
Semarang Timur	31.729	32.261	3.228	33.698	34.220	34.195
Semarang Utara	57.341	58.194	58.229	58.713	59.693	59.636
Semarang Tengah	26.002	26.436	26.454	28.336	28.776	28.754
Semarang Barat	72.102	73.311	73.355	74.613	76.015	75.972
Tugu	16.575	16.906	17.054	16.504	16.889	17.038
Ngaliyan	71.025	72.403	72.996	71.526	73.092	7.363
Kota Semarang	821.305	838.437	845.177	838.670	856.306	863.656

Keterangan Data :
 -Sumber : BPS, Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk

(Sumber : BPS, Sensus Penduduk dan Proyeksi Penduduk)

Dari segi struktur umur, penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun. Dominasi kelompok ini mencerminkan potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja, yang dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor industri, jasa, dan UMKM. Namun, tingginya jumlah penduduk usia produktif juga menuntut adanya penyediaan lapangan kerja yang memadai serta kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif agar potensi demografi ini dapat dioptimalkan secara maksimal.

Sebaran penduduk di Kota Semarang tidak merata. Kecamatan seperti Pedurungan dan Tembalang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, masing-masing mencapai sekitar 199.078 dan 193.219 jiwa. Sebaliknya, kecamatan seperti Tugu dan Mijen memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah. Ketimpangan sebaran ini menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi penduduk di wilayah-wilayah tertentu yang cenderung berkembang lebih pesat, sehingga menimbulkan tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan akses terhadap fasilitas ekonomi.

Selain aspek demografi, Kota Semarang juga menunjukkan keberagaman dalam komposisi agama penduduknya. Mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sebesar 87,62%, diikuti oleh pemeluk agama Kristen sebesar 11,74%. Selebihnya, penduduk memeluk agama Buddha (0,58%), Hindu (0,067%), serta Konghucu dan lainnya (0,025%). Keberagaman ini mencerminkan pluralitas sosial dan budaya yang menjadi kekuatan tersendiri dalam pembangunan kota. Kehidupan antarumat beragama di Kota Semarang umumnya berlangsung harmonis dan menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung stabilitas serta kolaborasi lintas komunitas.

Dengan karakteristik demografi dan sosial yang dimiliki, Kota Semarang memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Namun, di sisi lain, tantangan yang muncul seperti ketimpangan sebaran penduduk, urbanisasi yang pesat, serta kebutuhan pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi aspek penting yang harus diantisipasi oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu

mengedepankan prinsip inklusivitas dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan kota secara adil dan merata.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki peran strategis dalam sektor ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Kota ini menunjukkan perkembangan sosial ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat yang terus membaik. Dari sisi pendidikan, Kota Semarang memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup memadai, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Kota Semarang terus meningkat, dengan mayoritas penduduk usia sekolah telah mengenyam pendidikan minimal hingga jenjang menengah atas. Kehadiran berbagai institusi pendidikan ternama, baik negeri maupun swasta, seperti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, dan Politeknik Negeri Semarang, turut mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di wilayah ini.

Dalam aspek ketenagakerjaan, struktur ekonomi Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, sektor industri pengolahan dan jasa konstruksi juga memberikan kontribusi

signifikan dalam menyerap angkatan kerja lokal. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang sempat mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19, tren terkini menunjukkan perbaikan, didukung oleh berbagai program pemulihan ekonomi dan pelatihan kerja dari pemerintah daerah.

Dari sisi pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai Rp 140.177,37 miliar. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa menjadi kontributor utama dalam PDRB, mencerminkan diversifikasi ekonomi kota.

Gambar 2. 2 PRDB Kota Semarang Menurut Pengeluaran Tahun 2022



(Sumber Data : BPS Kota Semarang)

Adapun upah minimum regional (UMR) Kota Semarang pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp3.243.969, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan UMR ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak di wilayah perkotaan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam struktur perekonomian Kota Semarang. Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki basis pelaku UMKM yang cukup besar dan beragam. Peran UMKM di Kota Semarang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 160.000 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan. Jenis usahanya pun beragam, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, jasa, hingga industri rumah tangga. UMKM di Semarang tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha tradisional, tetapi juga mulai berkembang ke arah digitalisasi, inovasi produk, dan penguatan jejaring kemitraan.

Perkembangan UMKM di Kota Semarang tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah yang cukup aktif dalam mengembangkan ekosistem wirausaha. Salah satu kebijakan penting adalah terbitnya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro. Regulasi ini menjadi payung hukum sekaligus strategi untuk mendorong kolaborasi antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar, BUMD, BUMN, lembaga keuangan, hingga perguruan tinggi. Melalui jejaring kemitraan tersebut, UMKM mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pelatihan manajerial, bantuan teknis, serta perluasan pasar. Program seperti e-Gerai KOPIMI, Klinik Bisnis, dan pelatihan digital marketing merupakan

contoh konkret dari upaya pemerintah kota dalam membina dan memberdayakan pelaku UMKM agar lebih kompetitif.

Selain dukungan kebijakan, karakteristik masyarakat Semarang yang adaptif dan inovatif turut mendorong dinamika UMKM semakin hidup. Banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya melalui platform seperti marketplace, media sosial, dan e-commerce lokal. Hal ini terbukti mampu meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing produk UMKM Semarang, baik di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah kota juga secara rutin menyelenggarakan pameran dan expo UMKM, baik secara luring maupun daring, sebagai ajang promosi dan transaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun demikian, UMKM di Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta kendala legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Melalui penguatan jejaring kemitraan, fasilitasi pembiayaan, serta pelatihan berkelanjutan, diharapkan UMKM Kota Semarang dapat naik kelas dan mampu menjadi motor utama penggerak ekonomi lokal. Dengan segala potensinya, UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian Semarang, tetapi juga bagian penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan sosial.

2.2.1 Profil UMKM Kota Semarang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penguatan struktur sosial ekonomi masyarakat. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai sentra perdagangan dan industri kreatif yang bertumpu pada aktivitas UMKM. Dalam delapan tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan konsisten. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.901 unit UMKM. Angka ini kemudian melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2017 menjadi 11.048 unit, menunjukkan adanya perhatian dan minat masyarakat yang semakin tinggi terhadap dunia usaha mandiri.

Pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan rincian: 14.879 unit pada tahun 2018, 17.546 unit pada 2019, dan 17.892 unit pada 2020. Meski tahun 2020 merupakan masa awal pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi, UMKM di Semarang mampu bertahan dan tetap tumbuh meskipun secara perlahan. Kondisi ini menunjukkan resiliensi UMKM terhadap krisis serta efektivitas strategi pendampingan dan stimulus yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan pesat kembali terjadi pada tahun 2021 dengan total 22.212 unit UMKM, dilanjutkan dengan kenaikan signifikan di tahun 2022 menjadi 29.611 unit. Hingga tahun 2023, jumlah UMKM di Kota Semarang mencapai 30.024 unit, menandakan peningkatan hampir enam kali lipat dibandingkan tahun 2016.

Peningkatan jumlah UMKM ini didukung oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro. Kebijakan ini mengatur penguatan kolaborasi antara pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelaku usaha besar, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, dan instansi pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pasar, pembiayaan, pelatihan, dan teknologi bagi UMKM agar mampu meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha. Di samping itu, Pemerintah Kota Semarang juga meluncurkan berbagai program pendukung seperti e-Gerai KOPIMI, pelatihan digital marketing, serta fasilitasi pameran UMKM untuk mendorong promosi produk lokal.

Perkembangan UMKM di Kota Semarang juga dipengaruhi oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis lokal dan inovatif. Sektor yang paling berkembang di antaranya adalah kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan jasa kreatif. Transformasi digital menjadi salah satu penopang penting, di mana banyak pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk penjualan dan pemasaran. Hal ini tidak hanya membuka akses ke pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional usaha.

Gambar 2. 3 Jumlah UMKM Kota Semarang

NO	KODE KOTA	NAMA KOTA	TOTAL	SATUAN	TAHAP
1	3374	SEMARANG	9.908	UMH	2016
2	3374	SEMARANG	10.468	UMH	2017
3	3374	SEMARANG	14.879	UMH	2018
4	3374	SEMARANG	17.544	UMH	2019
5	3374	SEMARANG	17.890	UMH	2020
6	3374	SEMARANG	22.302	UMH	2021
7	3374	SEMARANG	25.491	UMH	2022
8	3374	SEMARANG	30.024	UMH	2023

(Sumber: <https://data.semarangkota.go.id/data/list/9>)

2.2.2 Kebijakan dan Program Pendukung UMKM di Kota Semarang

Kebijakan mengenai UMKM di Kota Semarang meliputi pemberian pinjaman dana bergulir, program wirausaha kredit, dan jejaring kemitraan usaha mikro.

1. Pemberian pinjaman dana bergulir
 - a) Pemerintah Kota Semarang memberikan pinjaman dana bergulir kepada UMKM dan koperasi.
 - b) Pinjaman dana bergulir ini disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk.
 - c) Besaran pinjaman dana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang.
2. Program kredit wirausaha
 - a) Pemerintah Kota Semarang memberikan program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Kredit Wibawa).
 - b) Program ini bermakna untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha UMKM.

3. Jejaring kemitraan usaha mikro

Pemerintah Kota Semarang juga memiliki program jejaring kemitraan usaha mikro. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM juga mencakup: Pelatihan dan pengembangan kapasitas, Digitalisasi UMKM, Regulasi dan perlindungan usaha, Pembangunan infrastruktur.

2.3. Gambaran Jejaring Kemitraan Usaha Mikro di Kota Semarang

Jejaring kemitraan usaha mikro di Kota Semarang merupakan salah satu strategi Pemerintah Kota dalam memperkuat ekosistem UMKM melalui pendekatan kolaboratif antara pelaku usaha mikro dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha besar, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, BUMN/BUMD, maupun komunitas bisnis. Jejaring ini dikembangkan untuk menciptakan sinergi dalam mendukung peningkatan kapasitas usaha mikro melalui pendampingan, pelatihan, penyediaan akses pasar, serta perluasan pembiayaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Implementasi jejaring kemitraan secara resmi diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro, yang bertujuan membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro dengan mitra usaha dalam berbagai bentuk seperti pola perdagangan umum, waralaba, titip jual, dan penyediaan lokasi usaha. Regulasi ini memberikan kerangka kerja legal sekaligus arah kebijakan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan usaha mikro (Pemerintah Kota Semarang, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, hingga tahun 2024, tercatat lebih dari 30.000 pelaku usaha mikro yang tersebar di 16 kecamatan. Untuk mendukung pengembangan jejaring kemitraan, pemerintah kota telah meluncurkan berbagai program, di antaranya:

- 1) e-Gerai KOPIMI (Gerakan Masyarakat Koperasi dan UMKM Semarang Indonesia) sebagai platform digital promosi dan kolaborasi pelaku usaha mikro di tingkat kelurahan hingga kota (Diskop UKM Kota Semarang, 2024);
- 2) Program Klinik Bisnis dan Inkubator UMKM, yang menyediakan pelatihan kewirausahaan, legalitas usaha, serta literasi keuangan dan digital;
- 3) Kemitraan berbasis CSR, bekerja sama dengan perusahaan swasta dan BUMN untuk pendampingan usaha, penguatan modal, dan pembukaan akses pasar (Imran, 2011);
- 4) Kemitraan antar UMKM dan pelaku usaha besar, difasilitasi dalam bentuk promosi bersama, sistem titip jual produk lokal di toko modern, dan penyediaan gerai permanen seperti yang dilakukan dalam Forum UMKM dan Gerai KOPIMI (Sujatmiko, 2013).

Pemerintah Kota Semarang juga aktif mendorong pemanfaatan platform digital sebagai bagian dari transformasi jejaring kemitraan modern. Melalui pelatihan digital marketing, pembentukan katalog UMKM, dan sinergi dengan marketplace nasional seperti Tokopedia dan Shopee, jejaring kemitraan diorientasikan pada perluasan jangkauan pasar secara nasional bahkan global (Sari & Wibowo, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan jejaring kemitraan usaha mikro di Kota Semarang juga masih menghadapi beberapa tantangan. Kesenjangan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep kemitraan, keterbatasan pendampingan secara intensif, serta belum meratanya distribusi informasi ke seluruh kecamatan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi jejaring ini. Selain itu, perbedaan kepentingan antar mitra usaha juga kerap menjadi hambatan dalam menjalin kerja sama yang seimbang dan berkelanjutan (Hafidz, 2021).

Secara keseluruhan, gambaran jejaring kemitraan usaha mikro di Kota Semarang menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan fondasi kelembagaan dan program nyata untuk memperkuat sektor usaha mikro. Namun, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan keberlanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar jejaring kemitraan ini dapat berfungsi secara efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif (Sugiyono, 2013).